

# OPOSISI BUKAN MUSUH PEMERINTAH<sup>1</sup>

Oleh Nurcholish Madjid

Nurcholish Madjid, secara konsisten melontarkan pikiran-pikiran tentang perlunya partai oposisi. Di benak pikiran Cak Nur, sapaan akrabnya, esensi oposisi adalah *check and balance*, tidak berarti *to oppose*, tapi juga *to support*. Dengan formalitas *check and balance* itu, maka *pent-up feeling* atau perasaan-perasaan yang tersumbat akan tersalurkan. Dan itu bisa menjadi lebih produktif. Sebab orang-orang (yang tersumbat — *ed.*) bisa dijadikan sumber ide-ide yang paling kreatif dan maksimal. Karena selama ini mereka tidak terlibat. Pikiran-pikiran tersebut tertuang dalam wawancara Nurcholish Madjid dengan wartawan Majalah *TIRAS*, A. Dhomiri dan Usman Sosiawan.

**Sebenarnya, bagaimana persisnya gagasan Anda tentang perlunya partai oposisi itu?**

Sebelumnya, saya harus menegaskan bahwa saya tidak akan mengklaim orisinalitas gagasan tersebut. Ini merupakan bagian *discourse* kita. Misalnya, kalau bertemu tokoh seperti Adnan Buyung Nasution, kami selalu bicara hal itu karena kebetulan saya memiliki garis pemikiran yang sama. Oleh karena itu, ini lebih tepat disebut

---

<sup>1</sup> Majalah *TIRAS*, “Oposisi Bukan Berarti Menjatuhkan Pemerintah”, No. 34/bln. 1.1/21 September 1995. Pewawancara A. Dhomiri dan Usman Sosiawan.

lontaran. Dan, lontaran ini sebenarnya sudah dimulai sejak sebelum Sidang Umum MPR lalu.

Pada sidang-sidang MPR, saya menyaksikan sendiri dalam pidato terakhir fraksi-fraksi umumnya menyebutkan bahwa di Indonesia tidak ada oposisi. Saya lihat hanya PDI yang agak lumayan. Tetapi, belakangan, saya merasa bahwa kecenderungan ini ada pada anak muda kita. Jadi, sebetulnya jika gagasan ini terlontar dari seseorang termasuk saya, itu tentu bukan lontaran secara individual.

### **Maksudnya?**

Ini cuma konstataasi (hal melihat atau menetapkan gejala atau tanda-tanda dari suatu keadaan atau peristiwa) dari kecenderungan yang sudah ada. Dan ini antara lain karena bangsa ini bangsa yang sukses, dalam arti ekonomi dan pendidikan berbangsa. Peningkatan kemampuan di bidang ekonomi dan pendidikan akan mempunyai akibat peningkatan di bidang politik. Itu dengan sendirinya. Seperti artikulasi, wawasan, aspirasi, sekarang ini *kan* semakin kaya, karena orang semakin tinggi pendidikannya.

### **Artinya, peningkatan ekonomi dan pendidikan itu harus dibarengi dengan deregulasi di bidang politik?**

Ya terang. Misalnya secara karikatural, kalau makannya sudah beres, dia akan bicara tentang sesuatu yang lain. Dan itu yang lebih tinggi termasuk aspirasi politik. Itu logis sekali. Makanya, menurut saya negeri ini akan semakin ribut dalam pengertian positif. Artinya, akan semakin banyak yang berani menuntut. Oleh karena itu, kita patut bersyukur. Bahwa pemerintah sendiri menyadari. Buktinya, buruh sekarang boleh berdemonstrasi, perizinan-perizinan akan dibuka. Saya pikir itu antisipasi yang bagus.

**Lantas, bagaimana Anda mengaitkan sejumlah perkembangan tadi dengan kemungkinan adanya partai oposisi?**

Dengan *back drop* seperti itu, maka berbicara oposisi sebenarnya hanya membumbui kecil saja. Cuma, ini menjadi persoalan karena ada sejumlah orang yang trauma dengan istilah itu. Jadi, karena ada pengalaman-pengalaman spesifik bangsa ini pada tahun 1950-an, oposisi lantas dibayangkan sebagai sikap-sikap yang tidak bersahabat dan apriori. Dalam masyarakat yang belum dewasa, bisa saja begitu. Tapi, kita percaya bahwa masyarakat sudah semakin dewasa. Dalam masyarakat yang belum dewasa, masih kanak-kanak, maka mengingatkan trauma itu, berarti menghina. *Ad hominem* istilahnya. Tertuju pada orang, lalu *character assassination* atau pembunuhan karakter, dan sebagainya. Nah, kalau kita secara terbuka dan formal mengakui perlunya ekspresi *check and balance*, maka kritik-kritik yang kekanak-kanakan, *ad hominem* yang lalu merosot menjadi menghina, itu akan terhindari. Justru kalau ditutup-tutupi, orang akan cenderung ke arah negatif.

**Tampaknya ada nuansa pendewasaan masyarakat dalam lontaran Anda itu?**

Ya, proses pendewasaan dan percepatan proses demokratisasi. Bisa saja kita secara optimistis membiarkan proses itu berlangsung secara alami. Tetapi, sesuatu yang dibiarkan menurut proses alam, bisa terlalu lama dan tidak terkontrol. Jadi harus ada *deliberation*, kesengajaan. Tidak boleh *by accident*, atau secara kebetulan.

**Revolusi?**

Kalau itu jangan, kita semua kan tidak menghendaki itu. Secara pribadi bolehlah saya mengakui trauma tahun 1965-1966. Dalam arti, kita jangan lagi mengalami proses yang harus menumpahkan darah.

Ada pendapat, oposisi tidak sesuai dengan kultur bangsa Indonesia. Lantas, oposisi mana yang Anda maksud, formal atau informal?

Karena perkataan oposisi itu sendiri bisa menimbulkan trauma, maka tidak usahlah kita memutlakkan kata oposisi. Yang lebih penting, tumbuhkan mekanisme pengawasan dan pengimbangan, atau yang lebih dikenal dengan istilah *check and balance* itu. Kalau ditanyakan formal atau informal, jelas harus formal. Yang informal bukan berarti tidak perlu, jelas harus formal. Yaitu dalam perwujudan mekanisme politik yang terbuka dan legal. Dalam hal ini, tentu melalui partai.

Oposisi yang informal memang sudah terjadi sekarang. LSM-LSM hampir semua begitu. Juga, misalnya, gambaran di balik kata-kata orang yang vokal. Tokoh vokal sebenarnya wujud dari *check and balance* yang informal. Tapi justru supaya hal ini tidak *accident* dengan segala eksesnya, maka lebih baik diformalkan. Sebab kita sendiri sering menggunakan metafor letupan, meletup. Artinya, suatu daya yang selama ini ditahan kemudian meletup. Kalau kecil meletup, kalau besar maka jadi ledakan.

Sejauh mana formalitas itu penting dalam hal ini?

Itu jelas. Dengan formalitas mekanisme *check and balance* itu, maka *pent-up feeling* atau perasaan-perasaan yang tersumbat itu akan tersalurkan. Dan itu bisa menjadi lebih produktif. Sebab orang-orang ini bisa dijadikan sumber ide-ide yang paling kreatif dan maksimal. Karena selama ini mereka tidak terlibat. Jadi ada kemampuan untuk menjaga jarak. *Keep distances* dari kenyataan-kenyataan. Sebaliknya, bagi mereka yang terlibat, keterlibatannya itu sendiri akan mewarnai pendapat dan sikapnya.

Waktu saya berbicara di Salemba, ada yang bertanya, “Apakah tidak perlu partai baru?” Logikanya sederhana saja: kalau itu memang diakui hak politik, termasuk pelaksanaan kebebasan-kebebasan asasi — yaitu kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan

berserikat, dan berkumpul — maka logikanya diperbolehkan lahirnya partai baru. Tapi, karena terbentur aturan formal — yang *notabene* buatan kelompok yang sekarang memegang kekuasaan — maka sekarang kita gunakan saja apa yang tersedia. Dan itu berarti PPP dan PDI.

**Tapi apakah itu mungkin, kalau melihat posisi PPP dan PDI yang tak lebih sebagai subordinasi kekuasaan?**

Itu *kan* sekadar langkah. PDI dan PPP posisinya memang canggung. Disebut partai pemerintah, bukan. Disebut partai oposisi, juga bukan. *Nah*, saya kira kecanggungan posisi inilah yang membuat mereka jadi tidak mampu berbuat. Tidak mampu mengambil inisiatif, yang kemudian diikuti oleh perasaan serba-salah. Dan kenyataannya memang begitu. Melangkah sedikit saja tegurannya sudah *out of proportion*.

**Kalau begitu, mengapa alternatifnya bukan partai baru?**

Memanfaatkan PPP dan PDI, itu yang paling mungkin. Orang bisa bicara, termasuk saya, bahwa yang paling ideal adalah membentuk partai baru. Itu memang bebas dari segala macam. Tetapi kenyataannya, kita terbentur pada aturan-aturan, kepada ini-itu, yang memakan waktu untuk mengubahnya. Misalnya, ada peraturan yang menyebutkan bahwa kontestan pemilu itu hanya ada tiga. Coba, bagaimana nanti mengubahnya? Tetapi, kalau PPP dan PDI itu sendiri yang memanfaatkan posisinya, maka apa yang kita harapkan sebagai *check and balance* itu akan terwujud.

Dan, dari situ akan ada *multiplying effect* (efek penggandaan), termasuk mereka sendiri yang akan menyadari. Sehingga, begitu melihat aturannya tidak cocok, ya diubah. Jadi menurut saya, lebih praktis memfungsikan PPP dan PDI sebagai partai pengawas dan pengimbang, kalau kita masih harus menghindari perkataan oposisi.

**Lalu, apa yang harus dilakukan. Mungkinkah dibatasi oposisi yang demikian itu merupakan lawan dari penguasa atau *ruling party*?**

Betul. Memang tidak selalu, apalagi kalau kita tangkap esensi oposisi adalah *check and balance*, tidak berarti *to oppose* tapi juga *to support*. Kalau kita bandingkan di Amerika, di sana *kan* formalnya ada partai pemerintah dan partai oposisi. Sekarang, misalnya partai pemerintah dari Partai Demokrat, maka oposisinya Partai Republik. Tapi dalam beberapa hal sering terjadi koalisi-koalisi. Sebagian Republik memihak sini, sebagian Demokrat memihak sana, dan sebagainya. Namun, itu semua dilakukan dengan inisiatif penuh dari orang-orang itu.

Jadi, itu bukan masalah kebijakan golongan atau kelompok, melainkan inisiatif penuh sebagai wakil rakyat. *Nah*, PPP dan PDI sebenarnya bisa seperti itu. Tapi, *pertama*, ada masalah mental, yaitu melepaskan diri dari stereotip bahwa mereka bukan ini bukan itu. Atau ya ini, ya itu. Maksudnya, bukan partai pemerintah, juga bukan partai oposisi.

**Konkretnya?**

Sekarang kita tegas saja, siapa mereka itu? Kalau mengaku partai pemerintah, tagih dong kepada pemerintah: mana bagian saya untuk memerintah. Coba, tahun 1970, PPP menang di Jakarta. Secara logika, PPP seharusnya yang memerintah Jakarta. Tapi, itu *kan* tidak logis. Di Aceh, PPP selalu menang, tidak pernah sekalipun PPP diberi kesempatan untuk memerintah Aceh. Itu *kan* tidak logis. Dalam hal ini, terus terang, Malaysia jauh lebih maju. Negara Bagian Kelantan dimenangkan oleh PAS dan selalu diperintah oleh PAS, meskipun Mahathir dari UMNO sengit sekali. Tapi, itu suatu mekanisme demokrasi yang logis.

**Masalahnya di Indonesia ini adalah kemandirian partai. Kita tahu bahwa ketergantungan parpol sudah sedemikian parah.**

**Lalu apa tindakan riil yang harus mereka lakukan dalam rangka memosisikan partai agar bisa mandiri?**

Yang riil adalah dimulai dengan suatu tindakan. Pada pemilu yang akan datang mereka harus berani menyatakan diri sebagai calon presiden. Ismail Hassan Metareum harus mulai tampil sebagai calon presiden. Megawati juga begitu. Ini *kan* tinggal dua tahun saja, harus mulai dicoba.

**Sesederhana itu?**

Kedengarannya memang sederhana, tetapi kompleks sekali. Karena apa? Kita sekarang dihadapkan kepada pertanyaan, “Oke, saya akan pilih Anda, tetapi apa bedanya dengan ini?” Harus ada proses redefinisi. Mendefinisikan kembali dirinya, siapa sebenarnya saya ini. Maksudnya wawasan, program dan sebagainya. Artinya, dengan dimulai sikap yang simbolik tadi, akan ada banyak redefinisi, *multiplying effect* yang banyak. Partai dipaksa untuk mendefinisikan kembali wawasannya, visi politiknya apa. Dengan berdasar visi politik itu, lalu programnya apa. Dengan begitu antisipasinya kalau mau menang. Misalnya, memperluas basis konstituensi, basis pemilihnya. PPP *kan* pemilihnya terbatas. Suatu partai dengan pemilih yang sudah terjatah. Saya berani taruhan, PPP tidak kampanye punya segitu perolehan suaranya. Turun tidak banyak, naik juga tidak banyak. Kalau seperti itu, lalu untuk apa berpartai? Berpartai itu *kan* untuk suatu saat menang dan memerintah. Logikanya *kan* begitu.

**Lalu, bagaimana kita bisa mengoposisikan kedua parpol itu sementara ABRI juga mempunyai wakil di DPR?**

Sebetulnya, adanya ABRI di DPR itu, karena tindakan-tindakan darurat. Itu ide awal Orba yang diotaki oleh almarhum Ali Moertopo. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, ide seperti

ini sifatnya darurat. Saat itu *kan* ada ketakutan terhadap upaya mengubah ideologi negara. Di situ Pak Harto berpikir, sehingga pada akhirnya sampai pada asas tunggal.

Seharusnya, kalau sudah ada asas tunggal, tindakan darurat segera ditinggalkan. Dan kita kembali kepada hal yang wajar. ABRI sendiri sekarang ada progres. Misalnya jumlah mereka di DPR dikurangi. Selain itu, statemen-statemen yang keluar dari ABRI — seperti Menhankam Edi Sudradjat — menurut saya itu luar biasa. Ketika seminar Sesko ABRI di Bandung pekan lalu, saya mempunyai kesan bahwa yang hadir itu mengerti dan bisa mengapresiasi apa yang saya kemukakan.

**Anda mengatakan bahwa peraturan itu dibuat dalam keadaan darurat. Bukankah itu berarti perlu perombakan?**

Kita tidak mengesampingkan begitu saja kegunaan dari peraturan-peraturan tersebut. Waktu itu ada istilah *sloganeering*, maka jadilah Golkar sebagai *single majority*. Memang, hal itu sudah terbukti baik karena negara ini selamat. Artinya, apa yang dikehendaki Ali Moertopo terwujud. Tetapi, karena sifatnya darurat *kan* bisa kontra produktif.

**Bukankah oposisi itu merupakan produk pemikiran liberal?**

Deregulasi sepuluh tahun yang lalu itu bagaimana? Itu *kan* pemikiran liberal. Ternyata sekarang diterima sebagai kenyataan.

**Baik. Tadi Anda juga mengatakan bahwa gagasan ini tidak baru.**

Benar. Gagasan seperti ini, sebenarnya sudah tercetus pada seminar-seminar Angkatan Darat. Misalnya, gagasan pemilu dengan sistem distrik. Pada waktu itu partai masih kuat dan mereka menentang gagasan tersebut. *Yah*, kandaslah gagasan itu. Dalam

ekonomisasi politik, tentu saja harus dihindari resiko yang terlalu besar, mengingat basis Orba masih *fragile*. Namun, bukan berarti ide itu tidak relevan.

Dulu, di Angkatan Darat, banyak sekali orang yang berpikir demokratis. Misalnya, ide tentang dwi partai, seperti di Amerika — yang menggambarkan adanya partai pemerintah dan oposisi. Itulah *check and balance*, kebebasan untuk mempertahankan atau mengganti pemerintah. Atau *freedom to fire and hire the government*. Tapi karena situasi yang tidak memungkinkan, maka gagasan itu dikesampingkan. Majulah solusi-solusi darurat, yang ternyata — harus diakui — terbukti kita bisa berjalan selama 30 tahun. Tetapi tidak benar juga, kalau ini lantas, sebagai solusi yang permanen. Bangsa ini makin maju, *kok*.

**Lalu apa komentar Anda tentang tanggapan Pak Harto, bahwa oposisi itu tidak dikenal dalam budaya bangsa Indonesia?**

Saya bisa melakukan *empathy* terhadap Pak Harto. Artinya, saya berusaha menempatkan diri pada posisi Pak Harto, beliau itu terlibat sebenar-benarnya dalam proses pembentukan negara ini. Jadi beliau melihat turun-naiknya bangsa ini. Karena itu, bagi saya, sangat masuk akal jika Pak Harto memberikan statemen itu. Tetapi saya membuat interpretasi di samping melakukan *empathy* tadi.

**Maksud Anda?**

Menurut saya, Pak Harto secara logis mewakili banyak orang yang memiliki trauma dengan eksperimen tahun 1950-an. Menurut saya ketika itu Indonesia secara tidak realistis, menerapkan demokrasi liberal. Tidak realistis, karena orang banyak masih buta huruf. *Nah*, akhirnya gagal total. Lihat Filipina yang mencoba menerapkan demokrasi *ala* AS, akhirnya gagal juga.

Jadi kaitannya dengan itu, memang relevan argumen mengenai siap atau belum siap. Itu bukan megada-ada. Di situ ada masalah

kenisbian. Artinya, mampu dan tidak mampu itu, apa dan bagaimana mengukurnya? Saya bisa melakukan interpretasi seperti itu, karena Pak Harto dengan tegas mengatakan bahwa perbedaan pendapat itu tidak saja boleh, tetapi juga baik. Dan kenyataannya memang demikian. Dalam perjalanan kepresidenannya, ada juga kemajuan. Hari demi hari menunjukkan bahwa dia mendengar pendapat-pendapat dari luar, dan kemudian mengambilnya.

**Kalau begitu, tanggapan Pak Harto bukan merupakan bantahan atas lontaran Anda itu?**

Saya tidak bilang begitu. Cuma, sekadar ilustrasi — sekali lagi saya minta maaf dan jangan ditafsirkan seolah-olah saya mengklaim orisinalitas — saya juga pernah berbicara mengenai ideologi terbuka. Ini pun merupakan wacana banyak kalangan. Beberapa tahun lalu, saya pernah mempunyai kesempatan untuk menyatakan hal itu secara umum. Ketika itu, saya diundang Menteri Sosial dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda, yang dilaksanakan di Aula Museum Satria Mandala. Saat itu disebut bahwa yang hadir adalah angkatan muda. Tetapi ternyata yang datang adalah perwira muda. Yang bicara waktu itu adalah almarhum Soediro, yang mewakili Angkatan 28. Alamsjah mewakili Angkatan 45, dan saya disebut sebagai angkatan penerus.

**Apa yang Anda katakan dalam acara itu?**

Ketika mendengar uraian Soediro dan Alamsyah, terkesan asyik sekali karena penuh dengan cerita nostalgia. Giliran saya berbicara, *kan* tidak mungkin bercerita tentang masa lalu. Tidak enak karena di belakang saya ada Sarwo Edhi Wibowo. Saya katakan pada forum, bahwa saya tidak bisa bernostalgia. Saya mengajak hadirin, melihat ke masa depan. Saya tegaskan pula bahwa kita semua sepakat bahwa masa depan kita adalah demokrasi — suatu tatanan sosial politik modern. Dan itu memerlukan ideologi modern, yang sifatnya *open*

*ended*, yaitu ideologi yang tidak dirumuskan sekali untuk selamanya, tetapi hanya rumusan aspirasi.

Saya katakan, Pancasila adalah rumusan aspirasi. Kalau menyebut Pancasila sebagai ideologi, boleh-boleh saja. Tetapi menurut saya, itu kurang tepat dibanding Marxisme sebagai ideologi. Pancasila bisa menjadi ideologi modern, kalau kita biarkan *open ended*. Maksudnya, Pancasila jangan dirumuskan secara mendetail sekali, untuk selamanya atau *once and for all*. Sebab, hal itu akan menyebabkan ideologi menjadi ketinggalan zaman.

**Maksud Anda semacam doktrin?**

Ya, doktrin yang tertutup.

**Bisa Anda berikan bukti?**

Contohnya komunisme yang cuma bertahan 75 tahun dan akhirnya menjadi *obsolete*. Itu sebetulnya dalil Karl Meinnhem, yang menyebut *ideology tends to be obsolete*. Nah, dalam rangka itu, maka berarti tidak dibenarkan adanya satu kelompok atau perorangan yang mengklaim sebagai yang berhak merumuskan. Jadi serahkan saja kepada dinamika masyarakat. Inilah *open ended ideology*.

**Bagaimana reaksi masyarakat ketika itu?**

Wah, keras sekali. Saya dituduh macam-macam. Tapi, sekali lagi, ini merupakan ilustrasi bahwa Pak Harto mendengar suara dari bawah. Sebab, tak lama setelah itu, Pak Harto dalam pidatonya di Bogor, menyebut soal ideologi terbuka. Sekali lagi, saya tidak mengklaim orisinalitas, tetapi itu menunjukkan bahwa Pak Harto mendengar dan menerima. Beliau bisa menerima kritik dengan gayanya yang khas.

## Termasuk lontaran gagasan tentang oposisi ini?

Saya katakan tadi, selain melakukan *empathy* terhadap apa yang beliau sebutkan — bahwa di Indonesia tidak mengenal oposisi — saya juga melakukan interpretasi. Yang dimaksud Pak Harto dengan oposisi adalah oposisi seperti tahun 1950-an, yang konotasinya itu sikap-sikap bermusuhan dan obsesi menjatuhkan pemerintah. Sementara, kita yang kembali ke UUD 1945 harus mengakui itu sebagai rahmat.

Idenya sendiri *kan* ide pemerintah kuat, seperti Amerika. Kita meniru Amerika, yaitu pemerintah yang periodik — di Indonesia 5 tahun, di Amerika 4 tahun. Dan, selama itu, presiden tidak pernah dijatuhkan. Di Amerika baru sekali terjadi skandal *Watergate*. Namun, dia masih tetap dihormati. Jadi, oposisi yang terjadi di Indonesia, tidak seperti oposisi yang terjadi di tahun 1950-an. Ini di dalam kerangka UUD 1945, di mana pemerintah tidak bisa dijatuhkan di tengah jalan. Karena itu, oposisi hanya berarti pengawasan dan pengimbangan tadi.

**Dengan kata lain, Anda menganggap bahwa Pak Harto tidak sepenuhnya menentang oposisi?**

*Exactly.* Yang dimaksud oposisi oleh beliau adalah oposisi *ala* 1950-an. Jadi, ini adalah interpretasi saya yang berdasarkan *empathy*. Saya menempatkan diri pada posisi beliau, yang menempatkan diri pada posisi yang menjalani sejarah 1950-an. Jelas saja hal itu membekas dalam dirinya. Apalagi saat itu, beliau masih muda. Jadi menurut saya, beliau tidak menentang oposisi. Buktinya beliau juga menegaskan bahwa beda pendapat itu penting. Itu *kan* sama saja.

Masalahnya sekarang, apakah hal ini akan dibiarkan terjadi *by accident* atau *deliberation*. Kalau *by accident*, maka akan terjadi letupan dan tidak terkontrol. Sebaliknya, jika *deliberation* yang artinya diarahkan dan diberikan pengakuan, semuanya akan bisa

lebih bertanggung jawab. Repotnya, kalau ini ditekan-tekan atau *pent-up feeling* itu tadi, maka yang muncul adalah *greget* atau emosi, yang kemudian akan muncul *ad hominim*. yang tertuju kepada orang tua.

**Dan gejala *ad hominim* itu sekarang sudah tampak?**

Sudah jelas sekali. Kalau nanti sudah dibuka semuanya, orang menghina akan tidak mendapat simpati. Sekarang orang menghina itu diberi tepukan, karena yang lain merasa tersalurkan.

**Lantas, bagaimana Anda mengaitkan oposisi itu dengan UUD 1945. Bertentangkankah ide itu dengan konstitusi kita?**

Jelas tidak. Sama sekali tidak. Saya punya *feeling* bahwa Pak Harto referensinya adalah pengalaman tahun 1950. Kalau itu, memang benar sekali. Kita tidak akan pernah bisa mengulangi lagi kesalahan tahun 1950-an. Oposisi itu juga bersifat kekeluargaan. Artinya, *conjugal values* itu dipertahankan. Jadi tidak ada kesengitan. Atau istilahnya paguyuban. Tetapi tidak berarti dalam keluarga tidak ada saling mengingatkan. Ingat-mengingat kan itu bentuk sederhana dari *check and balance* dalam sebuah keluarga.

**Berarti, oposisi itu pun tidak bertentangan dengan asas musyawarah-mufakat?**

Musyawarah-mufakat sebenarnya berangkat dari istilah dalam kultur Minang, sesuai dengan pepatah: *Bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat*. Lihat saja Muchtar Naim dalam melihat pola budaya. Dia menyatakan, bahwa pola budaya Indonesia ini ada dua, yaitu: Jawa dan luar Jawa. Eksponen luar Jawa itu *kan* Minang. Tapi sebetulnya tidak terlalu simetris. Kalau dilihat dari segi bahasa, kita menerima dengan enak, tenang, dan baik sekali. Dan bahasa

nasional itu dari bahasa Melayu. Dan itu berarti keluarjawaan, yang berarti pula budaya pantai.

### Maksud Anda?

Artinya, Jawa yang pantai pun begitu. Pantai Jawa itu lebih dekat kepada budaya pesisir, bukan pedalaman atau *inland culture*. Ciri-cirinya adalah kosmopolit. Orang Semarang, Palembang, Surabaya, ya sama saja walau berpindah tempat. Kemudian, egaliter dan *mobil*. Mereka juga bersifat terbuka dan berkecenderungan pola ekonomi dagang. Prototipenya Sriwijaya. Kalau Majapahit itu masih maritim. Dengan demikian, kalau kita kaitkan antara oposisi dengan asas musyawarah-mufakat, memang bisa bertemu. Karena istilah itu diambil dari budaya Minang, yang juga merupakan pola budaya pantai. Dan kita ketahui masyarakat dengan budaya pantai itu lebih terbuka.

**Tetapi, di Indonesia terkenal juga budaya *ewuh pakewuh*, yang sering menjadi kendala untuk melakukan ini-itu?**

Begini. Itu juga banyak stereotip. Banyak sekali yang menganggap bahwa orang asing tidak mengenal budaya *ewuh pakewuh*. Padahal, orang Amerika itu sopan sekali. Mereka terkadang lebih sopan, lebih *ewuh pakewuh* daripada kita. Saya punya pengalaman ketika pertama kali ke Amerika. Saya diperkenalkan oleh teman, yang memang sudah mengenal saya betul, kepada orang-orang Amerika lainnya. Terus terang, saya merasa risi dan menganggap teman saya terlalu berlebihan. Tetapi, rupanya, memuji orang merupakan bagian dari budaya mereka. Orang Amerika itu memang pemuja. Jadi, kita tidak bisa mencap budaya *ewuh pakewuh* itu negatif. Hal itu bisa negatif jika ditempatkan tidak pada tempatnya.

### Contohnya?

Misalnya dalam masalah benar dan salah. *Ewuh pakewuh* itu mungkin yang punya andil, sehingga kita dianggap sebagai bangsa yang lembek dari segi etika, atau *soft nation*. Kita cenderung membiarkan. Ini menurut saya tidak pada tempatnya. Kita harus tegas, apalagi dalam Islam kita mengenal *furqân*, yang berarti ketegasan dalam menentukan baik-buruknya sesuatu.

**Artinya, tak perlu PPP dan PDI *ewuh pakewuh* untuk mencalonkan presiden dari partainya?**

Ya, itu sebagai contoh simbolik tadi. Dengan begitu kita harapkan akan menjadi *multiplying effect*, seperti keterpaksaan unruk mendefinisikan kembali siapa saya, merumuskan kembali program, dan sebagainya. Sebab, kalau tidak demikian, itu *absurd* namanya. Dan ini penting untuk mendidik orang atau rakyat dalam melihat alternatif.

Selama ini kita tidak melihat banyak alternatif. Makanya, ketika Naro mencalonkan diri sebagai calon wapres, saya senang dan saya dukung, walaupun saya dari F-KP. Saya katakan itu secara terbuka. Hanya saya bilang, kalau hal ini berlanjut, dan terjadi pemilihan, saya tidak akan memilih Naro. Terus terang saya tidak suka. Jadi ini pemihakan terhadap sistem, bukan perorangan. Dan ini penting.

**Tadi Anda juga menyebut oposisi yang informal, sudah banyak di Indonesia. Bagaimana dengan Fordem (Forum Demokrasi), Petisi 50, Partai Rakyat Demokrat, dan lain-lain?**

Munculnya beragam kelompok itu jelas merupakan suatu hal yang positif. Itu merupakan bagian dari pertumbuhan demokrasi. Itu pula sebabnya mengapa pemikiran demokrasi merumuskan tentang perlunya kebebasan-kebebasan asasi, yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat. Termasuk lahirnya PCPP yang membuat orang takut akan menjadi pesaing ICMI. Kalau ICMI demokratis, ya tidak usah mengkhawatirkan PCPP. Biarkan saja dia tumbuh.

**Bukankah lahirnya kelompok-kelompok di luar sistem itu justru akan menambah letupan-letupan, seperti yang Anda sebut tadi?**

Memang benar. Itu bisa ditafsirkan sebagai letupan, kalau proses terbentuknya disertai dengan perasaan terpaksa. Tetapi kalau dengan perasaan kebebasan, karena diakui, itu bukan merupakan letupan, melainkan suatu penyaluran yang wajar. Jadi kemunculan seperti itu berbeda dengan kemunculan dalam situasi yang ditekan-tekan, atau karena *greget* tadi.

**Kalau melihat kondisi PPP dan PDI, mana yang kira-kira lebih siap untuk mengoposisikan dirinya? Atau, perlukah mereka berkoalisi untuk menjadi kekuatan oposisi?**

Tidak perlu begitu, karena nantinya sangat artifisial. Kalau PPP dan PDI memang mau menyatu, biarkan saja secara alami. Memang menyedihkan kalau persoalan di tubuh PDI itu tidak habis-habisnya. Ini, menurut saya, karena banyak orang berpolitik hanya sebagai politisi, bukan sebagai negarawan. Kalau sebagai oposisi, maka obsesinya selalu kepentingan pribadi atau kedudukan.

Makanya saya berpendapat, kalau memang mereka negarawan, mestinya mereka terjun dalam proses demokrasi — meskipun mereka tidak memperoleh apa-apa. Termasuk itu tadi, mencalonkan diri sebagai presiden, walaupun dia nantinya tidak mendapat apa-apa dan hanya mendapat kesulitan. Tetapi masyarakat akan melihat. Di situlah, saya menghargai sikap orang seperti Gus Dur. Cuma, kalau ditanya, mana yang lebih siap antara PPP dan PDI untuk dijadikan oposisi, saya kira itu hanya masalah teknis. Saya tidak tahu mana yang lebih siap.

**Kesannya, lontaran Anda tak lebih dari sekadar ajakan moral?**

Saya setuju dengan istilah ajakan moral. Dengan kata lain, ini semacam gerakan *people empowerment*. Ini menyangkut masalah

inisiatif. Dan inisiatif itu menyangkut masalah penggunaan kesempatan. Persoalannya adalah, kesempatan itu harus diciptakan. Bukan ditunggu atau diberi orang. Coba bayangkan, jika tiga partai ini seimbang akan sangat bagus sekali kehidupan politik kita ini. Dan sekali lagi, saya yakin, masyarakat kita tidak akan mengulangi kesalahan seperti yang terjadi di tahun 1950-an. Karena itu, dalil Orba untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen itu sudah betul. Ini dalam kerangka UUD 1945. Makanya, oposisi bukan berarti menjatuhkan pemerintah. [❖]